

BAB III

ISU PERBATASAN LAUT CINA SELATAN CINA-ASEAN

Konflik di Laut Cina Selatan dapat di kategorikan dalam 4 Hal ; Perebutan wilayah, lokasi untuk perikanan, eksplorasi dan pengembangan minyak, dan gas. Konflik di Laut Cina Selatan ini sebenarnya bukanlah konflik di antara semua negara ASEAN secara komprehensif, konflik ini sebenarnya lebih terpusat pada tumpang tindih wilayah dengan Filipina, Vietnam, dan Thailand, namun pada perkembangannya negara-negara seperti ; Indonesia, Malaysia, dan Brunei juga terkena gelombang permasalahan wilayah di Laut Cina Selatan.

Perkembangan konflik ini berdasarkan dari klaim berbentuk “U” Cina yang mengoverlapping dan meresahkan ASEAN. Hal ini dapat dipahami kenapa diplomasi yang terjadi diantara Cina-ASEAN dari bilateral menjadi ‘bi-multilateral’, dalam berbagai diplomasi langsung Cina kerap memaksa dan memojokkan menggunakan kalim sejarah mereka, namun dalam berbagai pertemuan ASEAN terlebih lagi dengan kehadiran Amerika, Cina tidak mengemukakan isu ini, sebaliknya justru ASEAN yang kerap mengangkat isu ini.

A. Klaim Cina Berbentuk “U” di Wilayah Laut Cina Selatan

Konflik maritim dan teritorial di Laut Cina Selatan menyeret 5 negara, yaitu : Cina, Brunei, Malaysia, Filipna, dan Vietnam. Tumpang tindih klaim yang terjadi

diantara Negara-negara tersebut tidak dapat terpecahkan dalam jangka waktu yang singkat.

Dari sudut pandang Cina dapat dipahami bahwasanya wilayah Laut Cina Selatan memiliki hampir semperempat cadangan minyak di dunia, walaupun hal belum terbukti dengan eksplorasi yang lebih jauh, namun Cina selalu marah bila ada usaha eksplorasi ataupun usaha pengembangan 'off shore' minyak atau pencarian gas di Laut Cina Selatan. Kejadian ini berulang kali dialami oleh Vietnam akhir-akhir ini. Puncaknya pada tahun 2011, kerjasama yang sudah hampir 'goal' dengan Exxon Mobil digagalkan oleh Cina, begitu juga dengan apa yang terjadi di Filipina, lama-lama bagi ASEAN Cina merupakan ancaman, begitupun juga Cina merasa ASEAN bagaikan kotoran yang terselip di gigi; permasalahan yang kecil tapi sulit untuk diselesaikan.

Gambar 1 : Peta Laut Cina Selatan dengan garis yang menandakan klaim wilayah masing masing negara.



Sumber : CSIS

Gambar diatas ini adalah peta dari Laut Cina Selatan, dimana di dalamnya menjelaskan tentang klaim wilayah dari negara :

- Cina
- Filipina
- Vietnam
- Brunei
- Malaysia

Garis-garis itu menunjukkan klaim dari negara; Cina ditunjukkan dengan garis putus-putus berwarna ungu, Filipina dengan garis warna hijau, Vietnam dengan warna biru muda, Brunei dengan warna kuning, dan Malaysai dengan warna oranye. Dari gambar diatas terlihat terjadi tumpang tindih klaim di laut tersebut dengan klaim Cina yang menyerupai huruf U. Dari negara-negara tersebut hanya Brunei yang klaimnya memiliki legalitas, sedangkan negara lain yang mengklaim menurut patokan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang berjarak 200 mil dari batas pantai wilayahnya. Dalam perkembangannya setiap negara memiliki klaim sepihak yang rumit dan unik, dimana klaim itu secara otomatis memperpanjang wilayahnya minimal 200 mil, sama dengan patokan maksimal ZEE, meskipun terjadi ‘overlapping’ dalam klaimnya dengan negara lain. Kerumitan ini bisa bertambah dengan klaim sepihak yang lebih jauh dari ZEE menjadi diatas 350 mil seperti yang diklaim oleh Cina dan Vietnam.

Gambar 2 : Peta Laut Cina Selatan dengan dengan wilayah resmi Cina dan wilayah yang diklaim berbentuk U.

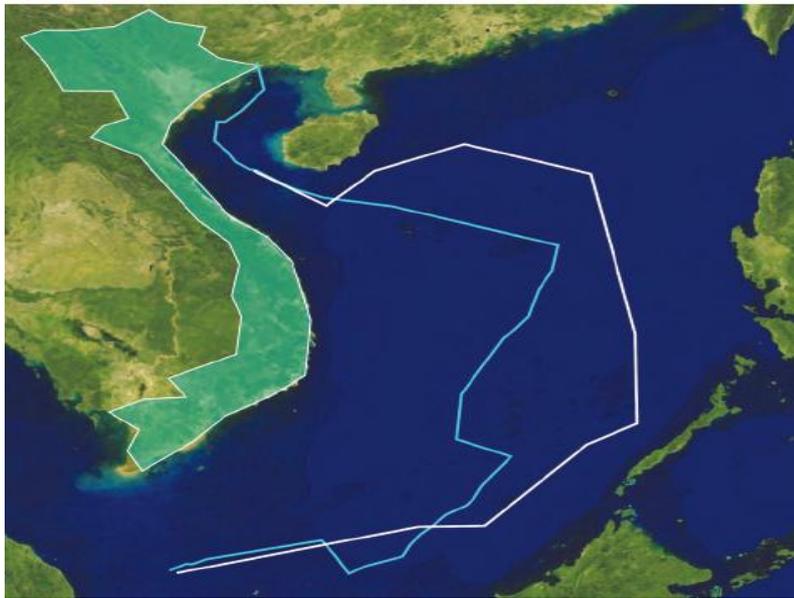


Sumber: CSIS

Garis putih ini adalah klaim Cina, Ambisi Cina dalam klaim ini di tolak mentah-mentah oleh pihak anggota-anggota negara ASEAN, berdasar dari klaim Cina ini bahkan Brunei tidak akan memiliki pantai, sayangnya tolakan ASEAN tidak memiliki nilai tawar “power” yang bisa di anggap Cina memuaskan, ASEAN dan Amerika menyatakan bahwa klaim berdasarkan nilai historis tidak akan pernah bisa menang dan dunia internasional akan tetap mendukung perjanjian tentang batas wilayah berdasar dari hukum internasional yang pada 15 Desember 2008 di Jakarta di adakan pertemuan

ASEAN yang menyetujui “Jakarta Charter” yang dalam salah satu poinnya adalah: “Berpatokan pada “United Nations Charter” dan hukum internasional”. Lebih jauh lagi menanggapi klaim Cina ini ASEAN memutuskan untuk menjalin kerjasama di bidang pertahanan dalam pembuatan senjata (industry pertahanan) yang akan di realisasikan pada tahun 2030 dan di dukung oleh Amerika.

Gambar 3 : Peta Laut Cina Selatan dengan dengan wilayah resmi Vietnam dan wilayah yang diklaim.



Sumber : CSIS

Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa konflik ini tidak bisa diselesaikan jika masing-masing pihak masih menggunakan cara klaim sepihak seperti saat ini,

dimana akan selalu terjadi konflik dan sengketa berkepanjangan tanpa titik temu. Jika di lihat dari patokan ZEE yang benar maka seharusnya batas laut negara-negara tersebut tidak menimbulkan sengketa karena klaim yang terjadi tidak terdapat tumpang tindih wilayah laut seperti pada gambar dibawah ini :

Gambar 4 : Peta Laut Cina Selatan dengan dengan wilayah resmi menurut ZEE

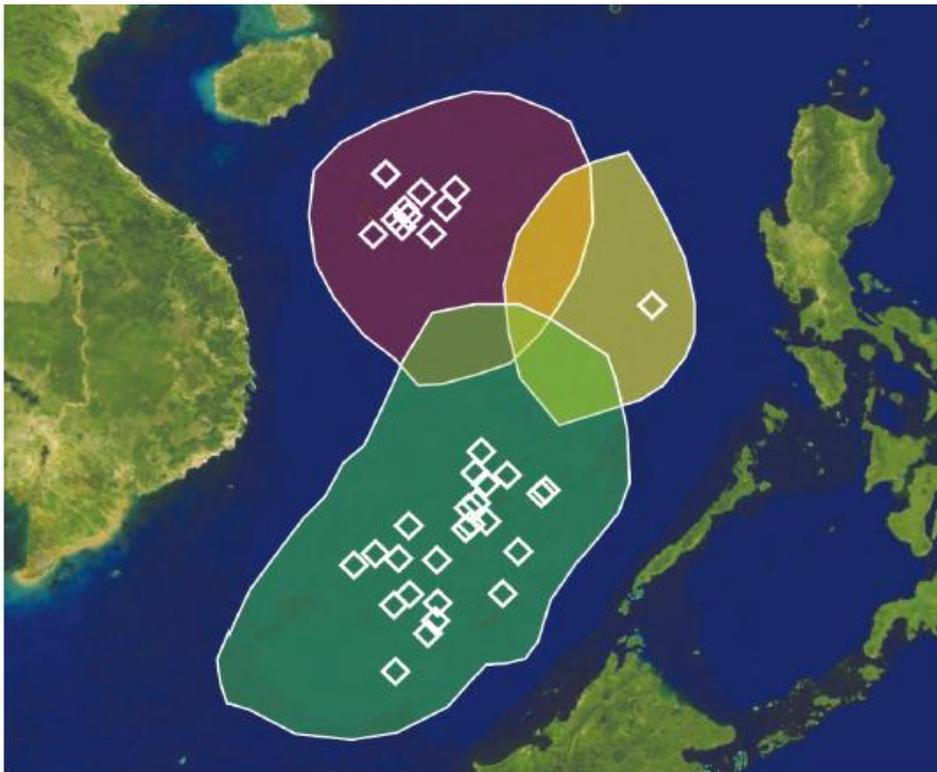


Sumber : CSIS

Kelima negara yang bersengketa ini yaitu; Cina, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei saat ini sama sama mengklaim seluruh kepulauan Spratly menjadi wilayah kekuasaannya, kecuali Brunei yang masih mempertahankan beberapa pulau disana.

Vietnam pun dilaporkan sudah mengerahkan pasukannya untuk menduduki 21 pulau diantaranya, diikuti Filipina 8 pulau, Cina 6 pulau, dan Malaysia 3 pulau. Mereka berlomba-lomba saling mengklaim berdasarkan beberapa historis, territorial, dan isu-isu yang ada. Tidak berhenti disitu, Cina dan Vietnam pun ikut mengklaim kepulauan Paracel dan Scarborough Shoal⁴³. Jika dilihat dari gambar peta di bawah ini, jelas terlihat pembagian gugusan kepulauan yang di sengkatakan.

Gambar 4 : Peta Laut Cina Selatan dengan pembagian gugusan kepulauan Spratly, Paracel dan Scarborough Shoal.



Sumber : CSIS

⁴³Lalita Boonpriwan, "The South China Sea dispute: Evolution, Conflict Management and Resolution", *ICIRD*, 2012

Pada gambar diatas, gugusan kepulauan Spratly di kelompokkan dalam warna hijau, gugusan kepulauan Paracel dalam warna ungu, dan gugusan kepulauan Scarborough Shoal dalam warna kuning. Sengketa yang mencakup area seluas 298.000 mil ini sudah beberapa kali di cari konflik resolusinya, dimana konflik ‘inter-personal’ antara negara yang menghasilkan pemecahan masalah atau meneruskan konflik tersebut dengan cara yang lebih halus dengan meminimalisir konflik sejata. Proses resolusi konflik ini ada umumnya melalui cara negosiasi, mediasi, diplomasi dan pembangunan hubungan damai.⁴⁴ Perkembangan ini membutuhkan focus dari anggota ASEAN yang bersengketa dengan Cina, yaitu; Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei untuk menentukan sikap dengan apa yang sebenarnya di sengketakan di Laut Cina Selatan dan yang tidak. Selama faktor yang fundamental ini tidak jelas, Cina akan selalu bersikap ambigu dan kontradiksi dalam mengklaim kepentingan di Laut Cina Selatan atas negara tetangga yang lebih kecil. Beberapa langkah yang mengarah ke faktor itu sudah diambil oleh beberapa anggota ASEAN yang berkonflik, seperti Vietnam dan Malaysia yang pada tahun 2009 bergabung dalam sub-misi tetang wilayahnya yang mereka kalam secara sepihak kepada CLCS adalah langkah yang pertama yang penting dalam konflik ini, dilanjutkan oleh Filipina dalam hukum baseline pada tahun yang sama establishing its coastal baseline in accordance dengan UN Convention on the law of the Sea (UNCLOS) dan yang lainnya.⁴⁵

⁴⁴Lalita Boonpriwan , op.cit., hal. 6.

⁴⁵Republic of the Philippines, republic Act no.9522, 10 Maret 2009, http://www.lawphil.net/statues/repacts/ra2009/ra_9522_2009.html.

B. Konflik Laut Cina Selatan: Perebutan Klaim Sumber Daya Alam

Pada awal tahun 1990-an, konflik menjadi rumit dengan klaim yang mengacu pada sumber daya laut, perikanan, minyak, dan gas. Sejalan dengan permintaan energi dunia yang naik, para negara yang berkonflik berencana untuk mengeksploitasi cadangan hidrokarbon di laut yang secara tidak langsung mengakibatkan naiknya tensi dalam sengketa ini, terutama antara Cina dan Vietnam. Nevertheless, sengketa energi di Laut Cina Selatan ini tidak perlu menghasilkan konflik militer, selama mereka sudah mau dan terus melanjutkan untuk 'manage' melalui perkembangan joint atau multilateral, dimana banyak pandangan tentang kerumitan di laut Cina Selatan. Cina mengklaim kepulauan Spratly dan Paracel dan semua wilayah lautnya untuk mencegah negara lain seperti; Vietnam, Filipina atau Malaysia, dari mengembangkan eksplorasi minyak dan gas yang potensial di wilayah yang diklaimnya. Cina juga pernah mencoba melebarkan klaim atas beberapa pulau di wilayah di laut Cina Selatan sebelah barat daya dari kepulauan Spratly yang mana pulau-pulau tersebut masih berada dalam gugusan kepulauan Natuna. Klaim ini tidak berhasil, dikarenakan perjanjian (treaties) Indonesia dengan Malaysia dan Vietnam sudah mengumumkan klaim atas keberadaan gugusan kepulauan Natuna ini.

Ditahun 2009, Cina juga mengklaim blok pengeboran milik Filipina di area Reed Bank, dimana kemungkinan tersimpan sekitar 3.4 milyar meter kubik gas dan 450 juta barrel minyak. Malaysia dan Brunei juga mengseketakan tentang pengembangan tambang gas di area yang mereka kalim saling tumpang tindih. Diidentifikasi blok tersebut diberikan kepada perusahaan yang berbeda: Malaysia memberikan hak

eksplorasinya kepada Murphy Oil, Dilain pihak Brunei memberikan hak yang sama kepada Royal Dutch dan Total.⁴⁶Laut Cina selatan dideskripsikan oleh analisi dari Cina mengandung cadangan sumber daya minyak dan gas yang sangat besar.Kandungan cadangan minyak di perhitungkan dapat mencapai 23-30 triliun ton, accounting for one-third of China's aggregate oil and gas resources.⁴⁷ Laporan lain dari Cina memperhitungkan terdapat 225 billion barel minyak di kepulauan Spratly saja. Di tahun 2006, Husky Energy berkerja sama dengan CNOOC mengumumkan telah membuktikan penemuan cadangan gas alam yang mendekati 4-6 trillion cubic feet di dekat kepulauan Spratly.⁴⁸

Pada tanggal 26 Mei 2011, terjadi insiden antara Cina dan Vietnam, yang mengambil tempat sekitar 80 mil dari bibir pantai Vietnam, yang masih dalam area ZEE Vietnam, ketika 3 kapal patrol Cina melakukan perusakan peralatan dan memberikan peringatan kepada kapal Vietnam Binh Minh 02 yang sedang melakukan eksplorasi minyak di Laut Cina Selatan karena melakukan tindakan kejahatan di wilayah kekuasaan Cina⁴⁹. Kemudian pada tanggal 25 Juni 2012, Cina sebagai pemilik perusahaan China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) responded untuk menaikkan tensi dengan Vietnam dengan cara mengumumkan pembukaan sembilan blok baru minyak dan gas lepas pantai yang akan dilelang kepada perusahaan asing. Blok ini

⁴⁶ Leszek Buszynski, "The South China Sea: Avenues toward a Resolution of the Issue," Paper presented at the *Workshop the South China Sea*, Hanoi, 2009

⁴⁷ Leszek Buszynski and Iskandar Sazlan, "Maritime Claims and Energy Cooperation in the South China Sea," *Contemporary Southeast Asia*, Volume 29, Number 1, (April 2007.),156

⁴⁸ Ibid

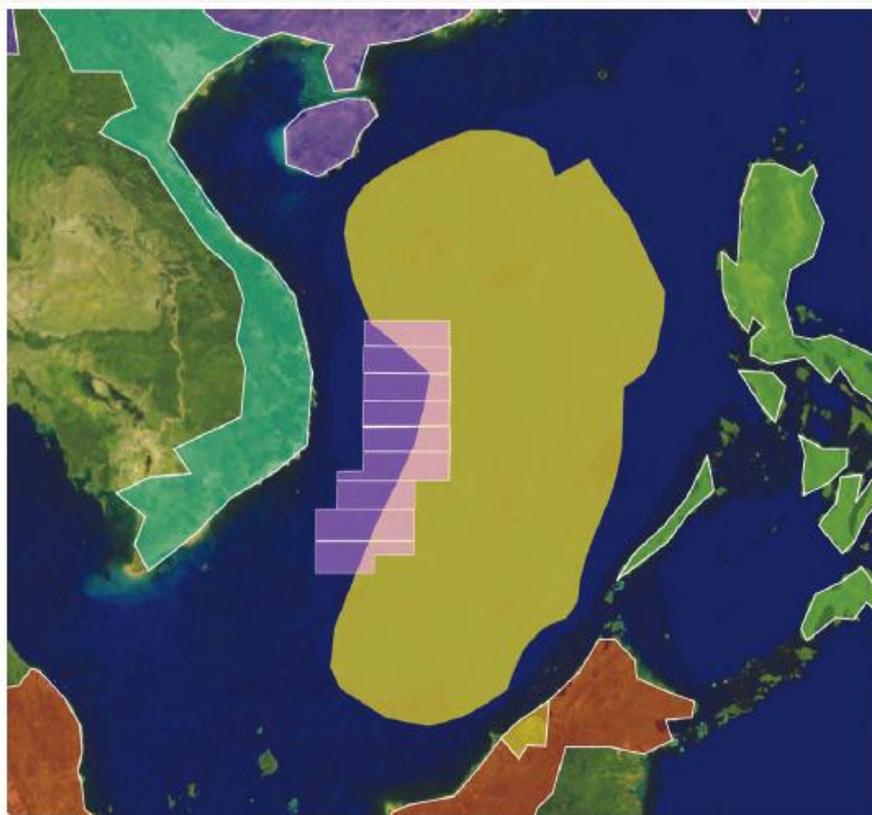
⁴⁹"Vietnam accuses China of threatening boat researching oil-drilling sites in South China Sea", *AP* ,27 Mei 2011,

<http://www.google.com/hostednews/canadianpress/article/ALeqM5hL8uj6abJ4M4dgA94pptkculWv6w?docId=6972004>

terletak di lepas pantai Vietnam dan lokasi yang terdekat berjarak 239 mil dari Cina. Semua Sembilan blok ini tumpang tindih dengan blok yang sebelumnya dibuat oleh Vietnam dan di leased oleh perusahaan asing juga, termasuk ExxonMobil.

Pada dasarnya overlaying blok ini dengan peta dari yang disengketakan (maximumlegal dispute), it is obvious kalau CNOOC sebenarnya tidak mempunyai dasar untuk mengklaim area yang dilelangkan tersebut seperti pada gambar peta dibawah ini :

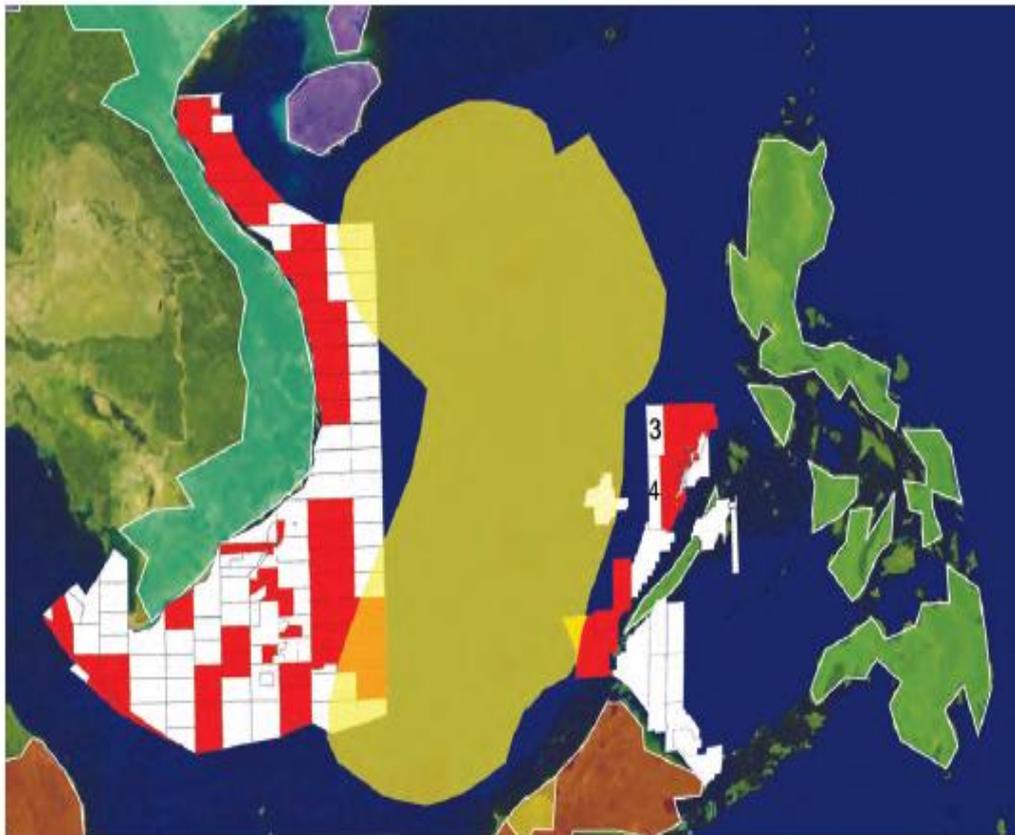
Gambar 5 : Peta Laut Cina Selatan dengan keterangan blok minyak dan gas lepas pantai yang diklaim CNOOC



Sumber : CSIS

Beberapa bulan sebelumnya, tepatnya tanggal 29 Februari 2012, Filipina telah mengundang beberapa perusahaan asing untuk mengambil bagian dalam kontrak energi sesi keempat yang sudah ditunggu cukup lama. Sesi ini membuka lelang untuk 15 blok minyak dan gas, dua diantaranya terletak di Area 3 dan 4, dimana mendapatkan protes keras dari Beijing. Meskipun blok itu berada di lepas pantai Filipina dan berjarak ratusan mil dari Cina, Beijing mengklaim bahwa area itu masih dalam legal maritime jurisdiction seperti pada gambar di bawah ini :

Gambar 5 : Peta Laut Cina Selatan dengan keterangan blok minyak Vietnam dan Filipina yang diklaim dan diprotes oleh Cina.



Sumber : CSIS

Sebagai wilayah yang disengketakan, Laut Cina Selatan secara terus menerus bisa menjadi jalan buntu. Dengan adanya energi cadangan di area itu, negara pengonsumsi yang besar seperti Cina akan mencari sumber baru untuk memuaskan perluasan ekonominya. Pada tahun 2009, Cina menjadi negara kedua pengimpor minyak setelah Amerika Serikat, dimana 52 persen mengimpornya adalah dari Timur tengah

Sekarang minyak dan gas menjadi satu-satunya aspek sengketa di Laut Cina Selatan, yang bisa menjadi kunci untuk dilakukan pengembangan secara bersama (joint development) di area tersebut. Jika di dalam area yang di sengketakan, terdapat larangan untuk mengeksplere wilayah disepanjang garis batas yang terlihat, maka minyak dan gas tidak akan pernah keluar dari tanah.⁵⁰ Kemudian, isu mengenai klaim teritorial dan akses terhadap sumberdaya energi di Laut Cina Selatan mulai menjadi poin penting untuk Amerika Serikat, Pesaing Cina di Pasifik Barat. Sejak tahun 2010, Laut ini mulai berhubungan dengan isu strategi yang lebih luas tentang strategi maritim Cina dan kehadiran Amerika Serikat di area itu. ASEAN berasumsi sikap Cina yang mengklaim seluruh wilayah Laut Cina Selatan masih bisa di negosiasikan, Dimana Cina akan bersedia membuat perjanjian tentang wilayah yang diklaim dan sumberdaya seperti perikanan, minyak, dan gas akan di kelola secara bersama-sama. Dari kondisi itu, ASEAN akan mengajak Cina berdialog dengan harapan para pemimpin Cina-ASEAN dapat diyakinkan tentang nilai dari “regime of norm” yang dapat memberikan kebaikan di Laut Cina Selatan. ASEAN dengan berhati-hati berusaha menghindari sikap

⁵⁰Gregory B. Poling, op.cit.

provokasi dari Cina yang kemudian dirumuskan dalam “ASEAN Ways”, sebuah tindakan yang berani dalam perjanjian menurut konsensus yang pada akhirnya akan membuat malu Cina. Ini bisa membuat area yang disengketakan menjadi lebih berbahaya dan menjadi alasan untuk lebih dipikirkan, apalagi dengan kembalinya ketertarikan Amerika Serikat atas Asia Pasifik dan memperkuat hubungan keamanan dengan negara ASEAN yang terlibat konflik di Laut Cina Selatan ini.⁵¹

Masing-masing pihak juga berniat untuk memecahkan masalah sengketa di Laut Cina Selatan ini melalui jalur perdamaian dengan cara konsultasi dan negosiasi melalui hukum internasional dibawah konvensi hukum kelautan PBB (UN Convention on the law of the Sea). Cina menjaga kedaulatan mutlak atas kepulauan Spratly ketika mendukung kerjasama dibidang ekonomi atas area yang disengketakan. Cina pada umumnya lebih memilih negosiasi dan hubungan secara bilateral dalam forum multinasional dengan pihak yang bertikai.

Semua pihak yang bertikai termasuk Cina sebaiknya mengambil inisiatif untuk menghindari aksi provokasi mengenai area yang disengketakan. Semua pengembangan baru gas dan minyak, pabrik serta bangunan yang menambah keruh kondisi, dan semua tindakan agresif militer yang sia sia harus dihindari dari area tersebut. Harapan terbaik dan yang paling nyata untuk menurunkan ketegangan dalam sengketa Laut Cina Selatan ini adalah dengan bentuk ‘Joint Development’ atas sumber daya yang aada di wilayah yang di sengketakan, termasuk sumberdaya perikanan minyak dan gas. Pertikaian dalam memperebutkan sumber daya ini menjadi penyebab terbesar atas timbulnya

⁵¹Leszek Buszynski op.cit., hal. 138-139.

kejadian-kejadian seperti insiden pelanggaran policy, gesekan militer, dan penangkapan nelayan di laut akhir-akhir tahun ini. Semua dampak positif dari program joint development resource ini diharapkan berimplikasi terhadap Cina, aktor utama di area yang di sengkatakan dan juga sebagai provokator dari banyaknya episode kejahatan di laut tersebut akhir-akhir tahun ini.